

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Tri Rachmawati R

trirahmawati50555@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the financial performance of Surabaya Local Government through BPKAD during 2020-2021. The financial performance was measured by financial ratios, namely Fiscal Decentralization, Independence, Effectiveness, Efficiency, and Balance. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the data were realization reports of the Surabaya Budget during 2020-2021. The instruments in the data collection technique used documentation, the web, and the official sites of BPKAD Surabaya analysis. Furthermore, the data analysis technique used financial ratios of descriptive qualitative. The result concluded that when financial performance was measured by (1) fiscal decentralization, it showed very good managing the development and existing sources, (2) the Independence ratio showed Local Government dependence on Central Government in the delegation category, (3) Effectiveness ratio showed ineffective in making the realization of PAD. It happened in the 2020 pandemic of Covid-19 decreased the revenue of PAD, (4) the Efficiency ratio showed low efficiency in managing the revenue budget and local expenditure. This happened in the 2020 pandemic of Covid-19 made the realization of the Local Budget was bigger than the Local Revenue, and (5) the Balance ratio showed it prioritized the operational budget needs. Thus, the capital expenditure ratio was relatively small.

Keywords: decentralization, independence, effectiveness, efficiency, balance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020-2021 melalui BPKAD. Pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan di penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan antara lain Rasio Desentralisasi Fiskal, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Keserasian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya tahun 2020-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, serta mengakses web dan situs resmi BPKAD Kota Surabaya. Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan jika diukur dengan (1) Rasio Desentralisasi Fiskal tergolong sangat baik dalam hal mengelola pembangunan dan sumber daya yang dimiliki. (2) Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat berada pada kategori delegatif, yakni tidak ada campur tangan atau bantuan Pemerintah Pusat. (3) Rasio Efektivitas menunjukkan kurang efektif dalam merealisasikan PAD, dikarenakan tahun 2020 adanya pandemi covid membuat realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan. (4) Rasio Efisiensi menunjukkan kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikarenakan tahun 2020 adanya pandemi covid membuat realisasi belanja daerah lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah (5) Rasio Keserasian menunjukkan masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Kata Kunci: desentralisasi, kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang

mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Untuk memanfaatkan kekuatan mereka yang diperluas, pemerintah daerah harus mengembangkan strategi untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan ekonomi mereka secara efisien.

Suatu pemerintahan tentunya tidak lepas dari laporan keuangan yang biasa disebut akuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan ini mempunyai peran untuk menentukan nasib pemerintah daerah karena daerah tersebut akan menjadi daerah yang kuat dan mampu berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangannya secara baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik maka akan membuat keutuhan asset daerah terjaga. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode supaya pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Salah satu yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintahan dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tentunya tidak terdapat keganjilan dalam penyajiannya. Laporan keuangan dengan predikat baik adalah yang mempunyai opini wajar tanpa pengecualian

Keberhasilan otonomi daerah pada aspek keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya. Mampu dalam artian tidak tergantung terlalu banyak pada dana transfer, baik dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan dana maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Maka satusatunya harapan pemerintah daerah ialah dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan agar keberhasilan keuangan daerah pada suatu daerah dapat tercapai dengan baik.

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Cara untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah baik atau belum yaitu dengan cara pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja pemerintah adalah salah satu fungsi manajemen dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja

keuangan pemerintah daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio yang digunakan antara lain yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian, kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal? (2) Bagaimana pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Kemandirian? (3) Bagaimana pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Efektifitas? (4) Bagaimana pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Efisiensi? (5) Bagaimana pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Keserasian?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal. (2) Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Kemandirian. (3) Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Efektifitas. (4) Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Efisiensi. (5) Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pengukuran Rasio Keserasian.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Sari (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk kepada publik untuk menjalankan roda pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu dengan didukung dengan laporan pertanggung jawaban secara

tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pemerintahan daerah di atur dalam undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah kebutuhan atas laporan keuangan, laporan keuangan untuk transparansi, laporan keuangan untuk akuntabilitas, memberikan informasi dan mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa laporan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, menilai kinerja manajemen suatu entitas pelaporan, dan juga menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu entitas pelaporan.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan penilaian untuk melihat tingkat pencapaian dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan hasil dari pengukuran tersebut memberikan motivasi dan arah untuk kedepan yang lebih baik. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan daerah.

Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah (mahmudi, 2016:140-142) yang meliputi:

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi merupakan kesanggupan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar lebih baik lagi untuk mendanai pembangunan daerah (Dharmawati, 2016). Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunannya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang telah memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak dan retribusi, sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio yang menyatakan kemampuan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut (Kawatu, 2019).

Rasio Efektivitas PAD

Tingkat efektivitas pendapatan daerah adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai pendapatan awal daerah yang diproyeksikan terhadap target yang telah ditentukan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Pangkey et al.,2017). Menurut Halim (2007),

semakin besar realisasi pendapatan PAD dibandingkan dengan tujuan pendapatan PAD, maka semakin efektif pendapatan PAD, begitu pula sebaliknya.

Rasio Efisiensi

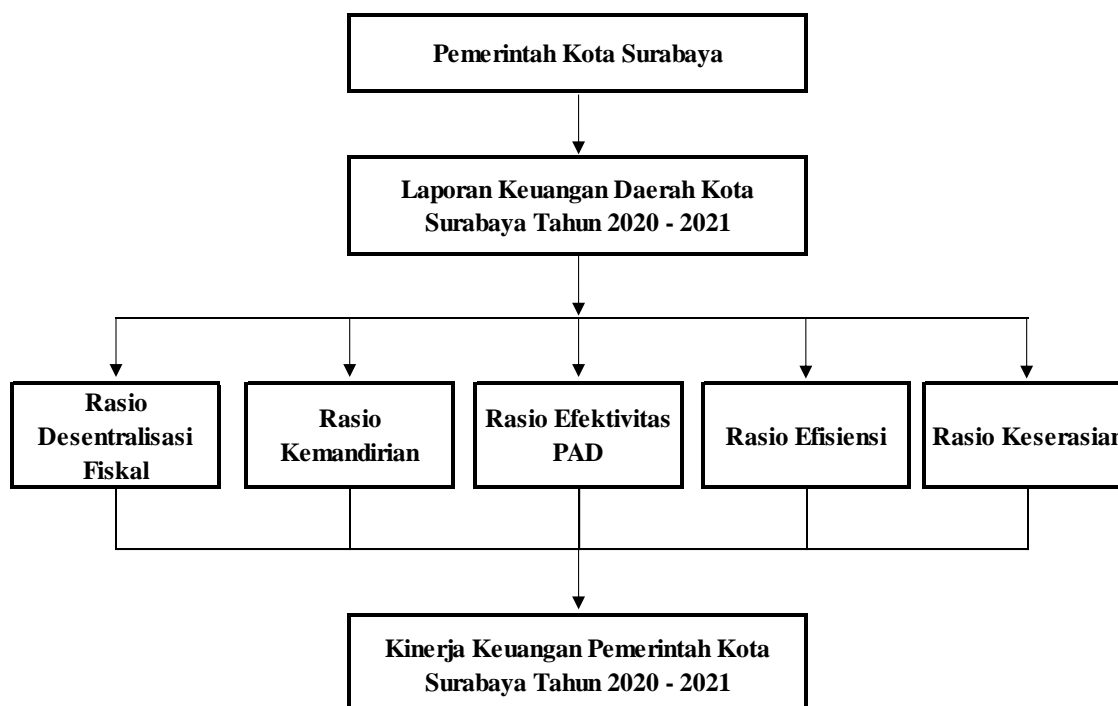
Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio antara total pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya dihasilkan, semakin rendah rasio yang dicapai, semakin tinggi efisiensinya (Ropa, 2016). Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234)

Rasio Kereserian

Rasio Kereserian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam rasio kereserian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal: Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi (2010).

Rerangka Pemikiran

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode riset yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara mengurai dan membahas data, menganalisis, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, sehingga memperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran jelas dan lengkap terkait permasalahan dalam penelitian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan proses riset dimana peneliti menerapkan cara dan teknik pengumpulan data secara alamiah dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis yang digunakan untuk keperluan analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau dengan cara meneliti berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang berguna untuk bahan analisis penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dimana data tersebut diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu BPKAD Kota Surabaya antara lain Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021.

Satuan Kajian

Rumusan penelitian mengarahkan unit kajian yang bersangkutan dengan Batasan batasan yang akan digunakan dalam proses penelitian. Fokus utama kajian ini adalah analisis kinerja keuangan, khususnya yang berkaitan dengan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2020-2021.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara mengolah sebuah data menjadi informasi yang mudah dipahami yang digunakan untuk membuat kesimpulan pada suatu penelitian. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori dari data yang telah didapatkan di lapangan. Tahap awal metode penelitian kualitatif ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan. Dalam metode analisa ini peneliti membandingkan Laporan Realisasi Anggaran untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan pemerintah Kota Surabaya dari tahun periode 2020 ke 2021.

Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan di Pemerintah Kota Surabaya kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara data yang diperoleh dideskriptifkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan terdiri dari tiga aktivitas yaitu: (1) Pengumpulan data penelitian dari BPKAD berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020-2021 yang telah diaudit oleh BPK. (2) Menghitung dan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020-2021 dengan menggunakan rasio keuangan yang digunakan, Adapun rasio keuangan yang digunakan adalah:

Rasio Desentralisasi Fiskal

Menurut Anita Wulandari rasio desentralisasi fiskal dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Adapun kriteria untuk menetapkan Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:32) Rasio Kemandirian dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berikut kriteria untuk menetapkan tingkat kemandirian keuangan

daerah. Adapun kriteria untuk menetapkan kemandirian dapat dikategorikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007:169)

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Instruktif yaitu peran pemerintah pusat lebih banyak daripada kemandirian pemerintah daerah dan dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Konsultatif yaitu peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Partisipatif yaitu peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
4. Delegatif yaitu peran pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahsun (2009) rasio efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Semakin besar realisasi pendapatan PAD dibandingkan dengan tujuan pendapatan PAD, maka semakin efektif pendapatan PAD, begitu pula sebaliknya. Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas PAD dapat dikategorikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Persentase (%)	Kriteria
(x < 100%)	Kurang efektif
(x = 100%)	Efektivitas berimbang
(x > 100%)	Efektif

Sumber: Mahsun (2009)

Rasio Efisiensi

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil nilai rasio ini semakin baik). Adapun kriteria untuk menetapkan Efisiensi dapat dikategorikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007:234)

Rasio Keserasian

Ada dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Total\ Belanja\ Operasional}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20%. Untuk rasio belanja modal belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan tingginya kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut adalah hasil analisis rasio desentralisasi fiskal:

Tabel 5
Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2020 - 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase (%)	Kemampuan
2020	4.289.960.292.327,98	7.545.416.994.175,97	56,86 %	Sangat baik
2021	4.727.280.629.669,69	8.326.878.076.226,29	56,77 %	Sangat baik

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Diolah, Tahun 2020-2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5. dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika dilihat dari rasio desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat baik, meskipun ada penurunan di persentase. Dimulai pada tahun 2020 rasio desentralisasi fiskal pada Pemerintah Kota Surabaya sebesar 56,86% dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 56,77%. Meskipun realisasi PAD dan total pendapatan daerah mengalami kenaikan, tetapi untuk persentasenya turun sebesar 0,09% dikarenakan pada tahun 2021 total anggaran pendapatan dengan realisasinya hanya selisih Rp. 348.130.170.907,71 atau sebesar 95,99% dari anggaran total pendapatan. Sedangkan pada tahun sebelumnya 2020 anggaran total pendapatan dengan realisasinya selisih 706.096.793.105,03 atau sebesar 91,44% dari anggaran total pendapatan. Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 6. dapat disimpulkan bahwa rasio desentralisasi fiskal selama tahun 2020-2021 pada Pemerintah Kota Surabaya sangat baik karena berada di skala interval >50,00%, artinya dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan sudah sangat mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut adalah hasil analisis rasio kemandirian:

Tabel 6
Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2020 - 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase (%)	Kemampuan
2020	4.289.960.292.372,98	2.725.829.859.924,00	157,38 %	Delegatif
2021	4.727.280.629.669,69	3.218.952.114.659,00	146,86 %	Delegatif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Diolah, Tahun 2020-2021

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 - 2021, tahun anggaran 2020 memiliki nilai rasio 157,38%, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota surabaya tahun 2020 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan social, masyarakat dari pada tahun anggaran 2021 yang mengalami penurunan persentase menjadi 146,86% hal ini sebabkan oleh adanya realisasi yang melebihi jumlah yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Pada pendapatan asli daerah yang melebihi jumlah yang dianggarkan yaitu pada pos lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sejumlah Rp. 558.639.903.759,00 terealisasi menjadi Rp. 681.089.357.589,70. Pada pendapatan transfer yang melebihi jumlah yang dianggarkan sejumlah Rp. 2.986.875.924.098,00 terealisasi menjadi Rp. 3.218.952.114.659,00. Meskipun begitu, nilai tingkat kemandirian tersebut masih sangat tinggi dan berada pada kategori delegatif.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Pada analisis efektivitas anggaran daerah menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pada rencana anggaran pendapatan. Berikut adalah hasil analisis rasio efektivitas PAD:

Tabel 7
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	Kemampuan
2020	4.289.960.292.372,98	5.035.094.239.075,00	85,20 %	Kurang efektif
2021	4.727.280.629.669,69	5.322.810.142.550,00	88,81 %	Kurang efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Diolah, Tahun 2020-2021

Berdasarkan tabel 8. di atas dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi pendapatan, mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yakni dari 85,20% ke 88,81%, namun tetap berada pada kategori tidak efektif. Tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020-2021 berkisar pada rata-rata diangka 87,01%. Berdasarkan rasio efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020-2021, tahun anggaran 2021 memiliki tingkat efektivitas Anggaran tertinggi meskipun tetap dalam kategori tidak efektif, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 5.322.810.142.550 dan nominal realisasi sebesar Rp. 4.727.280.629.669,69. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan tidak efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya, tetapi pada tahun 2021 sedikit lebih baik tingkat kemandiriannya daripada tahun 2020 dikarenakan selisih antara anggaran PAD dan realisasi PAD lebih kecil yaitu sebesar Rp. 595.529.512.880,31 dibandingkan selisih tahun 2020 sebesar Rp. 745.133.946.702,02 yang berarti tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah Kota Surabaya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Analisis Tingkat Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut adalah hasil analisis rasio efisiensi:

Tabel 8
Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Persentase (%)	Kemampuan
2020	8.032.680.988.065,47	7.545.416.994.175,97	106,46 %	Tidak efisien
2021	7.819.077.321.545,57	8.326.878.076.226,29	93,90 %	Kurang efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Diolah, Tahun 2020-2021

Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat diketahui tingkat efisiensi Anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan, mengalami penurunan persentase dari tahun 2020-2021 yakni dari 106,46% menjadi 93,90% yang semula pada tahun 2020 berada pada kategori tidak efisien dan tahun 2021 menjadi kurang efisien. Tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 100,18%. Nilai presentase tersebut masuk pada kategori tidak efisien. Pada tabel diatas tahun 2020 dapat dilihat realisasi belanja daerah sebesar Rp. 8.032.680.988.065,47 dan untuk realisasi pendapatan daerah lebih kecil sebesar Rp. 7.545.416.994.175,97. Sedangkan di tahun 2021 mengalami tingkat kemampuan yang lebih baik dari pada di tahun 2020 yaitu realisasi belanja

daerah sebesar Rp. 7.819.077.321.545,57 dan untuk realisasi pendapatan daerah lebih besar Rp. 8.326.878.076.226,29.

Besarnya angka realisasi anggaran belanja dari total realisasi Anggaran pendapatan yang diterima pemerintah menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kota Surabaya masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan, hal ini sama saja mengabaikan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Meskipun Pemerintah Surabaya berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun akan menjadi tidak berarti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar nilainya dari realisasi Anggaran pendapatan yang diterima

Analisis Rasio Keserasian

Pemerintah daerah memiliki prioritas dalam penggunaan belanjanya. Alokasi dana dapat diprioritaskan pada belanja operasional ataupun belanja modal dalam pembangunan, pelayanan, dan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal. Rasio keserasian yang digunakan dalam penelitian terhadap keuangan daerah Kota Surabaya yaitu perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut adalah hasil analisis rasio keserasian:

Tabel 9
Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase (%)
2020	6.439.039.886.246,00	8.032.680.988.065,47	80,16 %
2021	6.771.433.976.328,20	7.819.077.321.545,57	86,60 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Diolah, Tahun 2020-2021

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi terhadap total belanja daerah. Hasil Rasio Keserasian belanja operasi mengalami kenaikan, persentase tahun 2020 sebesar 80,16% dan meningkat menjadi 86,60%.

Tabel 10
Perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase (%)
2020	1.583.663.159.605,00	8.032.680.988.065,47	19,72 %
2021	1.016.336.503.390,00	7.819.077.321.545,57	13,00 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Diolah, Tahun 2020-2021

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 10. Rasio belanja modal mengalami penurunan. Dimulai tahun 2020 sebesar 19,72%, kemudian di tahun 2021 menjadi 13,00%. Penurunan rasio belanja operasi pemerintah kota surabaya tidak terlalu signifikan hanya sekitar 6,72%. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kota Surabaya lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan.

Pembahasan

Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut perhitungan tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja keuangan Kota Surabaya melalui pengukuran rasio desentralisasi fiskal mengalami perubahan kriteria, setiap tahun nya tergolong kriteria sangat baik karena berada di skala interval >50,00%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan sudah sangat mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya relatif besar atau rata-rata 50% dari total pendapatan daerah. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Surabaya bisa mempertahankan PAD dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru. Kemampuan pendapatan asli daerah dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Derajat desentralisasi diperlukan untuk menilai kemampuan daerah dalam hal kemandirian dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi (Sugeha *et al.*, 2015).

Analisis Tingkat Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut perhitungan tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja keuangan Kota Surabaya melalui pengukuran rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya akan dapat melaksanakan tugas administrasi dengan lebih baik, pengembangan masyarakat, dan pelayanan social berkat peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2020. Peningkatan jumlah realisasi transfer pendapatan yang melebihi jumlah Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 akan mengakibatkan penurunan derajat kemandirian keuangan daerah. Jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.986.875.924.098 direalisasikan sebesar Rp. 3.218.952.114.659,00 meningkat 107,77%. Namun, besaran kebebasan tersebut masih memiliki nilai yang sangat tinggi dan masuk dalam kategori delegatif.

Analisis Tingkat Efektivitas PAD Kinerja Keuangan

Menurut perhitungan tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja keuangan Kota Surabaya melalui pengukuran rasio efektivitas menunjukkan kurang efektif. Tahun anggaran 2021 memiliki tingkat efektivitas anggaran yang paling besar meskipun masih tergolong kurang efektif, dengan nominal Anggaran PAD sebesar Rp. 5.322.810.142.550 dan nominal realisasi PAD sebesar Rp. 4.727.280.629.669,69. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya sedikit lebih efektif pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 karena adanya pandemi covid yang menyebabkan penurunan realisasi penerimaan PAD karena adanya perbedaan potensi ekonomi daerah sehingga daerah sulit memenuhi penerimaan PAD. Tantangan untuk menghasilkan pendapatan PAD sesuai tujuan yang telah ditetapkan disebabkan oleh menurunnya potensi ekonomi yang juga menyebabkan melambatnya sumber daya daerah. Sumber penerimaan PAD Kota Surabaya dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah dan retribusi. Dilihat dari data BPKAD Kota Surabaya (2020) penerimaan pajak mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan pajak hotel dan restoran, dikarenakan saat pandemi covid pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat masyarakat tidak keluar rumah.

Analisi Tingkat Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut perhitungan tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja keuangan Kota Surabaya melalui pengukuran rasio efisiensi menunjukkan rata-rata tidak efisien. Hal ini mendeskripsikan bahwa kinerja pemkot Surabaya kurang efisien dalam

pengelolaan aturan pendapatan serta belanja daerah Kota Surabaya. Adapun penyebab taraf efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tergolong kurang efisien bahkan tidak efisien adalah realisasi belanja daerah yang lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 yang ketika itu pendapatan daerah menurun dalam membiayai belanja daerah yang bertambah penekanan oleh penanganan masalah COVID-19 dan potensi perekonomian menurun yang mengakibatkan penurunan pada pendapatan daerah.

Analisis Rasio Keserasian Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut perhitungan tabel 9 dan 10 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja keuangan Kota Surabaya melalui pengukuran rasio belanja operasi pada tahun 2020 sebesar 80,16% dan untuk rasio belanja modal sebesar 19,72%, sedangkan Rasio Belanja Operasi tahun 2021 sebesar 86,60% dan untuk Rasio Belanja Modal sebesar 13,00%, artinya sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya tahun 2020-2021 masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga Rasio Belanja Modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya pada pos belanja barang dan jasa. Hal ini karena belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kota Surabaya tergolong kecil atau belum terpenuhi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2020-2021 : (1) Berdasarkan pengukuran rasio desentralisasi fiskal tergolong sangat baik dalam berkontribusi terhadap total pendapatan daerah, artinya dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan sudah sangat mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. (2) Berdasarkan pengukuran rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berada pada kategori delegatif, yakni tidak ada campur tangan atau bantuan pemerintah pusat. (3) Berdasarkan pengukuran rasio efektivitas menunjukkan kurang efektif dalam merealisasikan PAD, dikarenakan tahun 2020 adanya pandemi covid membuat realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan. (4) Berdasarkan pengukuran rasio efisiensi menunjukkan kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikarenakan tahun 2020 adanya pandemi covid membuat realisasi belanja daerah lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah (5) Berdasarkan pengukuran rasio keserasian menunjukkan masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah periode penelitian yang relatif pendek yaitu tahun 2020-2021, dimana penelitian-penelitian lainnya menggunakan periode penelitian yang relatif lebih Panjang.

Saran

Berdasarkan keterbatasan pembahasan terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yaitu : (1) Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari sumber yang sudah ada sebelumnya sangat penting yaitu upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD dengan secara sistematis dan terus menerus mengawasi dan mengendalikan pemungutan PAD oleh

perangkat daerah untuk mengantisipasi penyimpangan dan memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah; (2) Pemerintah daerah juga perlu melakukan brainstorming solusi kreatif atas masalah kekurangan dana, yang membutuhkan pendekatan inovatif dari aparatur pelaksana keuangan daerah dalam bentuk, misalnya, program kerjasama pembiayaan dengan swasta dan program peningkatan PAD, kemungkinan di industri BUMD; (3) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011).
- Anshori, Z. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*.
- Dharmawati, M. K. 2016. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Deswira, A. 2022. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 72-88.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., dan Yuliatwat, T. 2008. *Metodologi penelitian akuntansi : mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*.
- Fornia, E., Mukhzarudfa, dan Gowon, M. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 34-44.
- Halim. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- _____, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____, A. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Malik, A. D. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2009-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 482-490.
- Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Norma. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Enrekang.
- Palupi, D. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah MEA*.
- Putra, S. A. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1-13.
- Sari, I., Asaari, M., & Nurul Hidayah, I. S. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *ISSN Online*.
- Sari. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugeha, F. F., Karamoy, H., & Pusung, R. J. 2015. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Accountability*, 4(1), 131-139.

- Tahawa, T. B., Nurhidayah, Erwin, dan Khaldun, R. I. 2020. Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Efektifitas dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2013-2018. *Management Development and Applied Research Journal*.
- Wulandari, S. 2017. Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Efisiensi dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
- Zuhri, M., dan Soleh, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis*, 187-195.